

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

Alam Setia Zain, 2000, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta, Rineka Cipta

Anthony Csabadi, 1971, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*. (the Hague,)

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika

Arizona Yance dkk, 2016, *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1287

Elizabeth A. Martin ed., 2002, *A Dictionary Law*, Oxford University Press, New York

Hingorani, 1984, *Modern International Law, Second Edition*, Oceana Publications

Huala Adolf, 1991, *Aspek-aspek negara dalam hukum internasional*, Jakarta, CV Rajawali

Hutagalung Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata (Teknis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika,

Joko P. Subagyo, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta

Joseph P. Harris, 1935, *Introduction to the Law on Nations*, (New York: McGraw Hill Series inc., political science)

JG. Starke, 1994, *Introduction to International Law* (: Butterworth, 9th ed. London, hlm. 201

Khulfi M. Khalwani, 2017, *Menilai Kerugian Kebakaran Lahan dan Hutan di Tingkat Tapak*, Bogor, IPB Press

Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013, *PutihHitam Pengadilan Khusus*, Jakarta, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia Komisi Hukum Nasional, *Laporan Tahunan 2007*, Jakarta 2007

Machmud syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia penegakan hokum administrasi, hukum perdata dan Hukum Pidana menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Bandung, 2012

Malcon N. Shaw, 2008, *International law 6th edition*, New York, Cambride University Press,

Malcom N. Shaw, 1989, *International Law, Second Edition*, Butterworths

M. Husein Harun, S.H, *Lingkungan Hidup masalah, pengelolaan dan penegakan hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Muhammad Rusli, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Philippe sand, 1995, *Principle of International Environmental law volume 1, Framework standards and Implementation*, New York, Manchester University Press

Rangkuti Siti Sundari, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Perss, Surabaya,

Sefriani, 2010, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Subagyo P. Joko, 1992, *Hukum Lingkungan Masalah dan penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta,

Sukanda Husin, 2016, *Hukum Lingkungan Internsional*, Rajawalipers, Padang,

Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional dan Implikasinya bagi Indonesia*

Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau,

Soekanto soerjono,2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS, Jakarta,)

Soekanto soerjono dan Sri Mamudji,2003,*Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,)

Said Sugiato Umar,2012,*Pengantar Hukum Indonesia*, sinar grafika, Malang,

Takdir Rahmadi, 2014, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press

B. Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Declaration of the United Nations Conference of the Human Environmental (Stockholm Declaration) 1992

The Rio Declaration of Environmental and Development 1992

Johanesburg Declaration on Sustainable Development 2002

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No 04 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak BPSP diubah menjadi Pengadilan Pajak

Odonansi Majelis Pelayaran, St. 1934-215 (27 April 1934), jo. St. 1938-2

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Mahkamah Agung

C. Surat kabar dan website

<http://nasional.kompas.com,peetisi-putusan-kebakaran-hutan-pengadilan-negeri-palembang/>

<http://www.mahkamahagung.go.id kasuspt-bumi-mekar-hijau/>

[http://www.mahkamahagung.go.id-kasus pt-kalista-alam/](http://www.mahkamahagung.go.id-kasus-pt-kalista-alam/)

www.environmentalcourt.govt.nz/environmental/court/of/new/zealand

www.legislation.nsw.gov.au/australian/environmental/court/of/new/south/wales

m.hukumonline.com/pengadilan/khusus/lingkungan/mutlak/dibutuhkan

www.voaindonesia.com/a/dpr//desak/walhi/pembentukan/pengadilan/khusus/lingkungan

www.lawteacher.net/international/law/trail/smelter/case

Liputan6.com perusahaan tergugat pembakar hutan divonis bebas walhi kecewa

